

## ABSTRAK

Pada masa sekarang, peranan notaris sangat penting dan dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam kegiatan berbisnis di masyarakat. Akta yang dibuat oleh notaris ini mempunyai peranan yang sangat besar, khususnya sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di kemudian hari dan memerlukan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Seorang notaris yang meninggal, berhenti atau diberhentikan sementara, protokol notarisnya akan diserahkan kepada notaris pemegang protokol akta yang sah, agar para pihak yang terlibat dalam akta notaris dapat meminta salinan akta kepada notaris pemegang protokol akta tersebut. Batas tanggung jawab notaris dapat dilihat dalam Pasal 65 UUJN, dimana meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada notaris pemegang protokol yang ditunjuk, notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya tersebut.

Sebagai suatu penelitian hukum, maka penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka apabila notaris pemegang protokol akta notaris lain mengetahui dengan jelas bahwa minuta akta dari notaris pembuat akta cacat hukum dan menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan namun salinan akta tetap dikeluarkan, maka notaris pemegang protokol akta notaris lain dapat dikatakan turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Demikian pula, apabila notaris pembuat akta dengan sengaja atau tidak membuat akta yang mengakibatkan akta yang dibuatnya tersebut merugikan para pihak yang terlibat dalam akta dan terbukti sebagai akta palsu, maka notaris pembuat akta juga dapat dikenakan sanksi pidana, perdata maupun administratif sebagaimana diatur dalam KUHP, UUJN, dan KUHPperdata.

Kata kunci : Protokol, tanggung jawab, notaris

## ABSTRACT

At present, the role of the notary is very important and needed in many areas of life, especially in business activities in the community. Deed made by a notary public has a very large role, especially as evidence in case of dispute in the future and require authentic deeds as the perfect proof for the parties. Notary protocol is a collection of documents that are State records must be kept and maintained by the notary. A notary who died, stopped or suspended, the protocol will be submitted to the notary protocol who hold a valid certificate, that the parties involved in the notarial deed may request a copy of the notarial deed holder of the protocol. Limit the responsibility of the notary can be found in Article 65 of UUJN, where even though the protocol has been submitted to the notary protocol designated holder, notary, notary a replacement, substitute notary special, and while the notary officer responsible for the deed he made.

As a legal research, the authors used the approach of legislation (Statute approach), the conceptual approach, and approach the case (case approach). Based on research conducted by the author, If the other notary who hold the protocol deed know about disability law of the “minuta” from the notary deed and be the force proof only as a deed under the hand but still issued a copy of the deed, the notary who hold the protocol deed can be said to participate in a crime as provided in Article 263 paragraph (1) KUHP Jo Article 55 paragraph (1) KUHP. Similarly, if the notary deed makers intentionally or not make a deed that resulted in the deed that made it hurt the parties involved in the deed and deed proved to be false, then the notary deed maker also may be subject to criminal sanctions, civil or administrative, as stipulated in the KUHP, UUJN, and KUHPerdata.

Keywords : Protocol, responsibility, notary